



Bawaslu Sulbar Gelar Diskusi Publik

Mamuju **Berita Nasional.ID** – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat Menggelar Diskusi Publik Dalam Rangka Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 ,dilaksanakan di Hotel Lestari , Selasa 19 Februari, dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Supriadi Narno dan Fitrianela Patonangi serta melibatkan organisasi kepemudaan sebagai peserta.

Sebagai Penyelenggara Pemilu salah satu kekuatan yang akan didorong yaitu partisipasi dari kalangan Pemuda untuk menjaga kualitas dan keamanan Pemilu.

“Salah satu keinginan kita adalah dengan menjaga kerukunan berbangsa dan bernegara khususnya dalam beragama dengan melibatkan secara intens pemuda lintas agama dalam pengawasan pemilu dinilai penting sebab, pemilu kita rentang terhadap gesekan-gesekan maka dari itu perlu adanya perspektif dewasa

dalam memandang kontestasi pemilu,” kata Anggota Bawaslu Sulbar, Supriadi Narno dalam sambutannya,

Selain itu, Kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan hal positif serta mendorong pengawasan Partisipatif pemuda untuk berperan aktif didalamnya. “Kita boleh berbeda namun persahabatan dan persaudaraan harus tetap kita jaga,” imbau Kordiv. Pengawasan, Humas dan Hubal itu.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Sulbar, Fitrinela Patonangi menegaskan Bawaslu secara struktural dan fungsional melakukan pengawasan Pemilu juga melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Kepemiluan.

“Maka dari itu melalui kegiatan ini kita berharap bentuk partisipasi pengawasan Pemilu tidak hanya melibatkan Bawaslu, Panwascam atau Pengawas TPS tetapi kita juga menginginkan keterlibatan pemuda dalam pengawasan pemilu,” cetusnya.

Fitrinela juga mengajak pemuda menjadi pemilih cerdas dan rasional sebab keterlibatan pemuda dalam Pemilu merupakan perwujudan wajah demokrasi di Indonesia.

Pada kegiatan tersebut, juga dihadiri oleh Direktur Banua Institute, Fajar yang mengatakan pemuda harus mampu melihat potensi kekurangan dalam pengawasan Pemilu dengan menggunakan gerakan civil society. “Gerakan civil society ini lah yang menjadi pilar dalam menjaga keutuhan kita dalam berdemokrasi, khususnya dalam melakukan pengawasan partisipatif menjelang Pemilu 2019 mendatang,” pungkasnya.

Laporan : Zul



Presiden KSBSI Nilai Debat Kedua Tetap Jokowi Yang Unggul

BeritaNasional.ID Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang juga Koordinator Nasional KSBSI For Jokowi Mudhofir Khamid menilai, Jokowi tetap unggul dalam debat capres kedua pada Minggu (17/2/2019) malam.

“Bahwa debat kedua, saya menilai Jokowi lebih unggul dari penguasaan materi soal Pangan, Energi, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Infrastruktur jika dibandingkan Capres Prabowo,” kata Presiden KSBSI Mudhofir Khamid, Selasa (19/2/2019).

Mudhofir juga menilai dalam debat kedua ini, Capres Prabowo

dalam pertanyaannya hanya retorid dan sudah terjawab langsung oleh hasil kerja Jokowi selama ini.

“Capres Prabowo hanya mengungkapkan jati dirinya dan mengapresiasi hasil kerja Capres Jokowi yang luar biasa,” ungkapnya.

Mudhofir yang juga Wakil Ketua Umum ReJ0 (Relawan Jokowi) menjelaskan, apa yang digembar gemborkan selama ini oleh Capres #02 Prabowo bahwa apa yang dilakukan semata untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat tidak berbanding lurus dengan faktanya.

“Hal ini kontradiksi dengan kenyataannya, bahwa beliau memiliki lahan yang fantastis luasnya, sementara Capres Jokowi membagikan sertifikat gratis untuk rakyat,” jelasnya.

Lebih lanjut, menurut Mudhofir tentu hasil debat semalam akan mempengaruhi pemilih khususnya yang selami ini belum menentukan pilhanya pada Pilpres 2019. Khususnya pemilih pemula dan millennial yang cukup signifikan.

“KSBSI berharap buruh dan masyarakat berpikir cerdas dalam memilih Presiden yang sungguh-sungguh berjuang untuk rakyat, untuk negara, untuk bangsa tanpa merasa takut demi terciptanya masyarakat Adil dan makmur,” tandasnya. **(daff/dki)**



Bawaslu Sulbar Silaturahmi Ke Polda Sulbar

Mamuju Sulbar .**Berita Nasional.ID** – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat Sulfan Sulo bersama Ka Sekretariat Bawaslu Idrus melakukan kunjungan silaturahmi ke Polda Sulawesi Barat.

Kunjungan Bawaslu Sulbar tersebut untuk melakukan koordinasi terkait pengurusan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye bagi Daerah Pemilihan (Dapil) Mamuju Tengah yang diketahui belum memiliki Kepolisian Resort masih melekat pada Polres Mamuju.

Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo mengatakan hal itu dilakukan agar memudahkan para Peserta Pemilu untuk melakukan pengurusan

administrasi sebagai bentuk kepatuhan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye. Baik dalam bentuk pertemuan tatap muka atau pertemuan terbatas sehingga akses informasi kepada masyarakat pemilih untuk mengetahui visi misi dan program yang ditawarkan oleh para calon dapat tersalurkan dengan baik, kata Sulfan. didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Sulbar, Idrus.

Lebih jauh, Sulfan mengapresiasi solusi dan fastrespon Polda Sulbar terkait dengan pengurusan STTP bagi Peserta Pemilu di wilayah Mamuju Tengah. “Kedepan, dengan dukungan Polda semoga kita dapat meminimalisir persoalan yang tidak kita inginkan pada pelaksanaan kegiatan kampanye yang dilakukan Peserta Pemilu baik di Mamuju Tengah maupun Sulbar pada umumnya,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolda Sulawesi Barat, Brigjen Pol. Baharuddin Djafar didampingi oleh Wadir Dirreskrim Polda Sulbar AKBP Iskandar, menegaskan pihaknya akan menintruksikan jajaran Polres Mamuju untuk bertugas memberikan pelayanan administrasi pengurusan STTP untuk kegiatan kampanye di Mamuju Tengah.

“Terkait dengan agenda koordinasi yang dilakukan Bawaslu Sulbar, kami akan menempatkan jajaran Kepolisian Resort Mamuju untuk bertugas memfasilitasi STTP di Mamuju Tengah sebelum kegiatan Kampanye dilakukan, sehingga para Peserta Pemilu di wilayah tersebut tidak lagi terbentur persoalan administrasi hanya karena persoalan jarak tempuh dan waktu untuk pengurusan,” terang Kapolda

Editor : Yuni



Helmi, Kasus Laporan Ketua Partai Demokrat dan Kades Gumirih Di Bawaslu Tetap Berlanjut

BeritaNasional.ID,

BANYUWANGI – Akhirnya Muhammad Helmi Rosyadi, selaku pelapor hadir memenuhi panggilan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk dimintai keterangan dan klarifikasi, Kamis (14/2/19).

Sebelumnya, Helmi sempat diinformasikan tidak hadir pada panggilan pertama sehingga memunculkan berbagai spekulasi. Helmi hadir sebagai pelapor dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi pada Musrenbangdes Gumirih beberapa waktu lalu.

Kendati Helmi tidak hadir meski sudah dapat panggilan, namun

kedua terlapor Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi Michael Edy Hariyanto dan Kades Gumirih Mura'i Ahmad hadir memberi keterangan di Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Banyuwangi. Bahkan pada Senin lalu (11/2/19), Ketua Partai Demokrat Michael Edy Hariyanto sudah mengklarifikasi atas kehadirannya di Musrenbangdes Gumirih.

Malahan Michael sebelumnya juga sudah mengklarifikasi melalui sejumlah wartawan bahwa kehadirannya diundang Kepala Desa Gumirih dalam kapasitas sebagai Ketua Partai. Sementara Kades Gumirih pada hari yang sama juga mengklarifikasi agenda acara Musrenbang didesanya tersebut saat di Bawaslu.

"Senin kemarin itu sebenarnya saya hadir untuk memberi keterangan, tapi agak terlambat karena ada keluarga sakit. Tapi begitu sampai di Bawaslu, unsur Gakkumdu dari Kepolisian dan Kejaksaan sudah pulang. Anggota Bawaslu juga sedang ada agenda kegiatan lainnya," jelas Helmi.

Berita sebelumnya, Helmi melaporkan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi sekaligus Caleg Partai Demokrat Dapil Banyuwangi 2 Nomor Urut 1 Michael Edy Hariyanto & Kades Gumirih Mura'i Ahmad atas dugaan melanggar Pasal 280 dan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Saya melaporkan dua orang tersebut dengan Pasal berbeda, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dalam Pasal 280, jelas dan tegas disebutkan larangan penggunaan kantor pemerintahan untuk kegiatan kampanye. Didalam Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dengan tegas disebutkan larangan bagi kepala desa untuk menguntungkan salah satu peserta pemilu," beber Helmi usai memberi keterangan di Sentra Gakkumdu Bawaslu Banyuwangi.

Menurutnya, pelanggaran hampir serupa bisa untuk menjadi perimbangan pada kasus salah satu Kepala Desa di Mojokerto dan Ustadz Slamet Ma'arif yang kini juga telah ditetapkan sebagai tersangka meskipun hanya undangan sebagai Ketua Persaudaraan

Alumni (PA) 212.

“Harusnya kepala desanya menegur ketika ada undangan yang datang di acara Musrenbangdes yang bersangkutan (Michael Edy Hariyanto) memakai baju/jaket beratribut partai politik. Dan seharusnya seluruh ketua partai politik diundang. Tapi kenapa yang diundang hanya ketua partai di tingkat kabupaten di Dapil 2. Padahal setiap partai politik mempunyai pengurus di tingkatan Kecamatan (Ketua PAC/DPC) dan Desa (Ketua Ranting),” sergah Helmi.

Selain itu, menurut Helmi di acara Musrenbangdes Desa Gumirih tidak patut dan diduga terjadi pelanggaran pemilu. “Tak patut Musrenbangdes yang menggunakan anggaran negara (APBDes) dan APBD disusupi dengan acara pendidikan politik oleh salah satu ketua parpol,” tegas Helmi.

Sebelumnya, Musrenbang Desa Gumirih yang dihadiri Ketua DPC Demokrat berlanjut ke meja Bawaslu Banyuwangi. Ketua DPC Demokrat Banyuwangi Michael Edy Haryanto dan Kepala Desa Gumirih Mura’i Ahmad, dilaporkan ke Bawaslu. Keduanya datang ke Bawaslu Banyuwangi untuk melakukan klarifikasi Senin (11/2/19). Meski dilaporkan terkait peristiwa yang sama, namun keduanya diproses dengan dugaan pelanggaran yang berbeda. Michael Edy Haryanto dilaporkan melakukan kampanye di gedung pemerintahan, sedangkan Mura’i Ahmad diduga melakukan kegiatan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu. (red)

Caption : Muhamad Helmi Rosyadi, saat datang memenuhi panggilan Bawaslu, Kamis (14/2/19).



PPP Ajak Guru Di DKI Jakarta Tangkal Hoax

BeritaNasional.ID Jakarta – DPW PPP DKI Jakarta mengundang Hafizh-hafizhah dan guru madrasah se-DKI Jakarta untuk bertemu dengan pengurus PPP DKI Jakarta di Amarosa Hotel, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (13/2) malam.

Dalam pertemuan itu dibahas soal penyebaran hoax yang semakin masif jelang pelaksanaan Pemilu 2019.

Pimpinan Presidium Forum Silaturahmi Hafizh-Hafizhah Indonesia (FSHI) Muhammad Ainul Yakin mengatakan sedikitnya 200 hafizh-hafizhah serta guru madrasah se-DKI hadir dalam acara bertema 'Pekokoh Ukhuwah, Pemilu Damai Tanpa Hoax' ini.

Kata Ketua Departemen Bidang Pemerintahan DPP PPP ini, pertemuan ini penting dilakukan karena kondisi dan situasi di masyarakat, khususnya di Jakarta cukup memprihatinkan jelang

Pemilu 2019.

“Semakin dekat dengan pelaksanaan Pemilu 2019, penyebaran hoax dan sandiwara yang direkayasa semakin masif. Kita berkewajiban mendampingi masyarakat agar tidak terpengaruh berita-berita hoax,” kata caleg DPRD DKI dapil Jaksel 7 ini di Arosa Hotel, Kebayoran Lama, Jaksel.

Namun, Ainul Yakin tidak memungkiri, acara-acara seperti ini salah satu cara dari PPP agar tetap dekat dan dipercaya oleh umat.

“Kami melakukan pendekatan persuasif dan preventif di tengah gencarnya hoax yang beredar di masyarakat,” imbuhnya.

“Kami mengingatkan kembali kepada umat muslim di Jakarta bahwa PPP adalah rumah besar mereka. Kami yakin umat akan kembali ke rumahnya,” tambah Ainul Yakin.

Di tempat yang sama, anggota DPRD DKI Fraksi PPP Rendhika D Harsono mengatakan seluruh hafizh-hafizhah dan guru madrasah se-DKI sepakat menjaga kedamaian Ibu Kota sehingga penyelenggaraan Pemilu 2019 berjalan dengan lancar dan aman.

Ditegaskannya, penyebaran hoax harus diantisipasi jika tidak ingin Indonesia menjadi seperti beberapa negara di Timur Tengah.

“Ujung-ujungnya hoax akan menciptakan konflik di masyarakat,” kata caleg DPR RI dapil DKI II ini.

Menyinggung soal dukungan warga Jakarta kepada PPP di Pemilu 2019 nanti, Rendhika menyatakan optimis.

“Usia partai kami ini sudah 46 tahun. Warga Jakarta tidak meragukan komitmen PPP memperjuangkan kepentingan dan aspirasi umat Islam,” tukasnya.

Pastinya, lanjut Rendhika, sebagai partai senior, PPP memiliki struktur dan loyalis yang kuat hingga akar rumput dibandingkan

partai-partai politik yang baru bermunculan beberapa tahun terakhir ini.

Pada pemilu-pemilu terdahulu, ucapnya, PPP selalu diprediksikan akan ditinggalkan oleh umat, tapi faktanya justru didukung. “Hasil akhir membuktikan, umat Islam di Jakarta memilih dan percaya kepada PPP untuk memperjuangkan kepentingan mereka,” ujar Rendhika.

Dengan berseloroh Ainul Yakin menambahkan lagi, PPP memiliki jurus ampuh sehingga tetap didukung oleh umat pada setiap kali pemilu. “Kami punya jurus wirid. Jurus ini tidak bisa di-survey. Saya sarankan lembaga survey sebaiknya mempelajari metodologi wirid supaya mereka tahu kenapa PPP didukung oleh umat,” ujarnya tersenyum.

Hadir juga di acara ini Ketua DPW PPP DKI Abdul Azis dan Ketua DPC PPP Jaksel Saiful R Dasduki. **(daff/dki)**



Aktris Kirana Lestari Siap Turun Ke Lapangan Dukung Jokowi-Amin

BeritaNasional.ID Jakarta – Bersamaan dengan kehadiran Forum Komunikasi Masyarakat An-Nahdliyyin (FKMA), hadir pula aktris Kirana Larasati ke kediaman KH Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo 12, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

Selain mengikuti kajian keagamaan dan tausiah kebangsaan usai Solat Subuh berjamaah, aktris kelahiran Jakarta 29 Agustus 1987 ini juga berkesempatan sarapan pagi bersama KH Ma'ruf Amin.

“Satu kehormatan bisa mendengarkan tausiah kebangsaan dari Kiai yang sangat saya kagumi. Tambah senang karena saya juga diajak sarapan pagi bareng. Abah Amin luar biasa. Sangat bijaksana, rendah hati, berpengetahuan luas bukan hanya soal agama, tapi juga ekonomi, budaya, sosial kemasyarakatan,” ujar Kirana.

“Yang bikin saya makin kagum ternyata ingatannya sangat kuat. Abah bisa bercerita secara sistematis mana saja daerah yang sudah dikunjungi dan mengingatkan saya bahwa dia sudah dua kali bertemu dan apa yang saya lakukan dalam pertemuan itu Abah Amin bisa ceritakan secara detail. Saya saja lupa,” kata wanita yang membintangi puluhan sinetron ini.

Sambil sarapan pagi, bintang film Gotcha, D'Girlz Begins, Perempuan Punya Cerita, Purple Love, Kota Tua Jakarta, Turis Romantis, dan Nenek Siam ini juga banyak bertanya soal visi dan misi Kiai Ma'ruf terkait milenial dan kaum perempuan.

“Milenial itu generasi masa depan. Saya mau maju sebagai cawapres Pak Joko Widodo bukan untuk kepentingan saya pribadi. Tapi, untuk para generasi muda. Saya teringat pelajaran saat

Ibtidaiyah saat seorang guru bercerita bahwa ada orang tua yang susah payah menanam pohon, padahal belum tentu dia akan menikmati hasilnya,” papar Ma’ruf.

“Orang tua itu berkata, saya menanam hari ini bukan untuk saya, tapi untuk generasi muda yang akan menikmati apa yang saya tanam. Itulah yang menginspirasi saya untuk maju bersama Pak Jokowi,” cerita KH. Ma’ruf Amin.

“Generasi milenial saat ini ada sekitar 5 juta lebih yang akan menjadi pemilih pemula. Mereka jangan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan Pilpres 2019, tetapi harus diberdayakan. Generasi muda harus kita siapkan untuk persaingan era milenial 4.0,” KH. Ma’ruf Amin menegaskan.

Saat bintang FTV berjudul Ku Ingin Bilang I Love You (2014) dan puluhan FTV lainnya itu bertanya soal perempuan, KH Ma’ruf Amin pun dengan gamblang menjelaskan. “Dalam Islam, perempuan itu tiang agama. Artinya perannya sangat besar untuk keberlangsungan suatu bangsa.”

“Jangan menganggap remeh perempuan. Mereka yang menentukan hitam putihnya kehidupan dari mulai lingkup keluarga, masyarakat dan negara. Perempuan memiliki peran penting di Republik ini. Karena itu pembinaan baik spiritual maupun ilmu pengetahuan dan teknologi harus berjalan bersinergi. Perempuan Indonesia harus maju dan punya kemampuan bersaing di dunia global,” KH Ma’ruf Amin menegaskan.

Penjelasan KH Ma’ruf Amin yang begitu gamblang menambah keyakinan Kirana Larasati bahwa pilihannya mendukung pasangan Capres dan Cawapres 01 semakin kuat. Bahkan, Kirana mengaku siap untuk turun lapangan mengampanyekan pasangan 01 untuk memenangkan Pilpres 2019. “Setelah ngobrol dan sarapan pagi bareng, jujur saya semakin mengagumi keilmuan dan kepapakan Abah Amin.”

“Sosoknya sangat mengayomi. Saya sebagai generasi milenial dan juga kaum perempuan sangat bangga mendapatkan perhatian luar

biasa lewat visi misinya. Tambah lagi, ternyata Abah juga bilang sering nonton sinetron saya saat waktu senggang. Ternyata, Abah Kiai nonton sinetron saya juga. TOP BGT deh pokoknya. Abah Amin sangat menguasai banyak hal ternyata. Juga dunia yang saya geluti,” kata Kirana yang mendapatkan hadiah buku Ma’ruf Amin Way dari KH Ma’ruf Amin. **(Dewi Fatimah/dki)**



Ibunda Cawapres Sandiaga Uno Sakit Hati Berbagai Fitnah Dilontarkan Kepada Anaknya

BeritaNasional.ID Jakarta – Serangan para politisi di media banyak kalimat yang tidak sesuai fakta, berbagai fitnah yang sering dilontarkan kepada Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Salahuddin Uno membuat ibundanya, Mien Uno, berang.

Bahkan, dia meminta orang yang sering memberi label 'Sandiwara Uno' kepada putranya itu meminta maaf kepada dirinya.

Sebagai orang yang telah melahirkan dan membesarkan Sandiaga, Mien Uno mengaku sakit hati ketika ada orang yang menghina anaknya tersebut.

"Jadi kalau ada yang mengatakan 'Sandiwara Uno' itu adalah sesuatu yang mungkin dia (Sandi) tidak apa-apa, tapi yang sakit hati itu ibunya," kata Mien Uno sembari matanya sembab di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

Perempuan 78 tahun tersebut mengaku ingin sekali menjelaskan tentang sosok Sandiaga kepada orang-orang yang telah memfitnah. Dia mengaku selama ini telah mendidik Sandiaga dengan penuh kasih sayang dan nilai-nilai agama serta aturan yang baik.

"Saya ingin berhadapan dengan orang itu (pelaku fitnah) mengatakan bahwa apa yang dilakukan (Sandiaga) adalah sesuatu yang memang benar terjadi. Jadi sekarang kalau ada orang yang mengatakan itu Sandiwara Uno dia harus minta maaf kepada ibunya yang melahirkan dan mendidik Mas Sandi dengan segenap tenaga untuk menjadi orang yang baik. Siapa yang mau berhadapan dengan saya sebagai ibunya?," tegas Mien Uno.

Pasangan dari Razif Halik Uno ini mengaku sedih ketika apa yang disampaikan dan diperbuat anaknya dipertentangkan. Dia yakin apa yang diucapkan dan diperbuat Sandiaga adalah tentang kebenaran sesuai yang dia ajarkan sejak kecil.

"Saya sedih banget sebagai orangtua yang melihat keadaan yang terus menerus dipertentangkan yang sebetulnya itu adalah hal yang tidak benar," ucap dia.

Mien Uno menjelaskan, selama ini dia mendidik Sandiaga sesuai ajaran turun temurun dimana selalu menekankan ajaran agama dan norma-norma sesuai adat di Indonesia.

“Mas Sandi itu saya didik memang sesuai dengan aturan dan apa-apa yang saya telah terima pada waktu saya kecil. Orangtua saya kebetulan dua-duanya guru jadi saya mendidik sesuai dengan aturan,” kata dia.

Untuk itu, lanjut Mien, ia tidak heran dengan sikap anaknya yang tidak pernah membalas setiap fitnah atau kabar negatif yang dialamatkan kepada Sandiaga Uno di masa pilpres saat ini.

“Nah banyak yang mengatakan Mas Sandi itu kok sabar amat yah, Dikata-katain sama orang dia cuma senyum. Nah, itu ada aturannya sebetulnya yaitu landasannya adalah etika. Etika adalah aturan emas. Landasannya adalah moral,” tandas Mien Uno. (dki1/bn)



Bamsoet Tidak Heran Elektabilitas Jokowi Jauh Ungguli Prabowo

BeritaNasional.ID Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo tidak heran jika elektabilitas Presiden Joko Widodo masih jauh mengungguli rivalnya, Prabowo Subianto. Celebes Research Center merilis elektabilitas Joko Widodo 56,1 persen dan Prabowo Subianto 31,7 persen.

“Kinerja Presiden Joko Widodo selama empat tahun ini terbukti mendapat respon positif dari masyarakat. Namun demikian, Prabowo ternyata cukup tangguh mengejar. Pertarungan pada 17 April nanti akan sangat seru sekali. Semua berada di tangan rakyat mau memberikan kedaulatan kepada siapa, karena itu jangan Golput,” ujar Bamsoet saat menghadiri rilis survei nasional Celebes di Jakarta (10/02/19).

Turut hadir menjadi narasumber antara lain, anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Anggawira, Direktur Penggalangan Pemilih Muda TKN Jokowi-Maruf Amin Bahlil Lahadalia, Rektor Universitas Al Azhar Asep Saifuddin dan pengamat politik dari UIN Adi Prayitno.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan kebumen ini yakin, kedua kandidat baik Jokowi maupun Prabowo akan semakin gencar memanfaatkan sisa waktu yang hanya sekitar dua bulan lagi menuju pencoblosan. Semua hal masih bisa terjadi, elektabilitas masih bisa naik dan turun.

“Walaupun pertarungan sengit, tapi rasionalitas harus tetap dikedepankan. Hindari melakukan kampanye hitam seperti menghasut permusuhan, mempolitisasi agama, maupun menyebarkan hoax dan ujaran kebencian,” tutur Bamsoet.

Selain mengajak kedua kandidat mengedepankan sikap kenegarawanan, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini tidak lupa mengajak para pendukung masing-masing kandidat untuk membuka hati dan pikiran. Kenali lebih jauh masing-masing capres, timbang dengan baik plus dan minus maupun track record keduanya.

“Jadilah pemilih yang cerdas karena memutuskan pilihan setelah melalui pertimbangan yang matang. Bukan karena pertimbangan emosi sesaat. Bijaksanalah mencari rekam jejak keduanya, bukan hanya dari group WA atau media sosial saja. Melainkan juga harus menggali dari sumber-sumber media massa yang sudah jelas kredibilitasnya,” urai Bamsuet.

Kepala Badan Bela Negara ini mengingatkan, usai 17 April, semua pihak juga harus bersatu kembali. Apapun hasil Pemilu harus diterima dengan bijaksana oleh kedua Capres maupun pendukungnya. Jika merasa ada kejanggalan, bisa diteruskan ke proses hukum. Bukan dengan melakukan agitas maupun propaganda yang memancing konflik sosial.

“Usai 17 April, kita kembali bersama sebagai satu bangsa, satu negara. Yang menang jangan jumawa, yang kalah jangan tidak terima. Jika tidak melalui kepemimpinan nasional, masih banyak bentuk pengabdian yang bisa diberikan kepada bangsa dan negara. Menjadi warga negara yang baik, serta mendukung berbagai program kerja pemerintah juga merupakan bentuk bakti kepada Ibu Pertiwi,” pungkas Bamsuet. (dkil/bn)



Jokowi-Ma'ruf Didukung Ribuan Alumni SMA DKI Jakarta

BeritaNasional.ID Jakarta – Sejumlah alumnus dari beberapa SMA di Jakarta melakukan deklarasi mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Alumni yang hadir pada acara yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu (10/2/2019) sore itu berasal dari beberapa SMA antara lain SMA 1, SMA 6, SMA 70, SMA 4, SMA 8, dan SMA Tarakanita.

Capres 01 memasuki ruangan di Istora Senayan pada sekitar pukul 15:00 WIB.

Sejumlah tokoh yang mendampingi Jokowi saat acara itu antara lain Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Tohir, Wakil Ketua TKN Moeldoko, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Politisi PDI Perjuangan Pramono Anung, Politisi Partai Golkar Agus Gumiwang, mantan sekretaris jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Yenny Wahid, serta anggota TKN Budi Karya Sumadi.

Deklarasi Alumni SMA Jakarta Bersatu dibacakan oleh seluruh peserta yang dipimpin oleh beberapa perwakilan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menandatangani gitar lukis buatan anak muda bangsa.

Selain acara di Istora, mantan Wali Kota Solo dua periode itu direncanakan menghadiri acara Silaturahmi Purnawiran TNI-Polri di JI Expo Kemayoran. **(dki1/bn)**



HPN 2019, GPK-RI Soroti Rawan Intimidasi Kebebasan Pers Oleh Pihak Oposisi

BeritaNasional.ID Jakarta – Gerakan Pemerhati Kepolisian Republik Indonesia (GPK -RI) mengucapkan selamat Selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2019 yang diperingati setiap tanggal 9 Februari.

Ketua GPK-RI Abdullah Kelrey menyatakan Jurnalisme di Indonesia, dibentuk oleh semangat menyuarakan informasi yang bermanfaat bagi publik, dan gelora dalam mendendangkan kebenaran dan keadilan. Kekuatan ini membuat api semangat jurnalisme masih menyala dan bertahan sampai detik ini.

“Gerakan Pemerhari Kepolisian, mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2019, semoga semangat jurnalisme tetap di pertahankan, dan dapat memberikan kontribusi dalam mendorong kemajuan bangsa indonesia baik di bidang pendidikan, hukum dan ham, politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” kata Kelrey kepada wartawan, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat hari ini.

Kendati demikian ditengah akses informasi terbuka luas, ancaman persekusi terhadap wartawan oleh kelompok tertentu masih berjalan.

Sesuai catatan digital terjadi intimidasi dilakukan pihak yang kerap menyatakan oposisi terhadap pemerintah masih marak. Di antaranya oleh rombongan Aksi 211, Jumat (2/11) terhadap jurnalis. Intimidasi itu berawal saat seorang jurnalis media online nasional tersebut memfoto sampah yang berserakan di lokasi aksi, tepatnya di sekitar Patung Kuda, Monas, Jakarta.

“Lalu peristiwa Capres Prabowo Subianto menolak diinterview jurnalis maupun mengkritik jurnalis secara terbuka bukanlah sesuatu yang baru, bahkan mengkonfirmasi keputusan tim

kampanye Prabowo-Sandi secara resmi memboikot wawancara Metro TV sejak 22 November 2018,” jelasnya.

Kemudian masih banyak lagi kasus intimidasi yang dilakukan oleh pihak oposisi terhadap awak media. Sementara menurut data statistik yang dikumpulkan Bidang Advokasi AJI Indonesia, mencatat setidaknya ada 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan itu meliputi pengusiran, kekerasan fisik, hingga pemidanaan terkait karya jurnalistik. Jumlah ini lebih banyak dari tahun lalu yang sebanyak 60 kasus dan masih tergolong di atas rata-rata. Kekerasan terhadap jurnalis paling banyak terjadi tahun 2016 lalu (sebanyak 81 kasus), paling rendah 39 kasus pada tahun 2009 lalu.

“Besarnya harapan kami dari Gerakan Pemerhati Kepolisian agar kedepan pihak oposisi menghargai kerja keras insan pers. Lantaran Pers sebagai Pilar ke-4 demokrasi dan ikut mengawal jalannya roda pemerintahan,” tegasnya.

GPK RI juga mengimbau pihak kepolisian tak gentar menindak pihak-pihak yang diduga melakukan intimidasi terhadap media lantaran pers bekerja atas perlindungan undang-undang.

“Jangan sampai kebebasan insan pers justru menjadi ancaman serius akibat tindakan oposisi yang tidak sepakat dengan pemberitaan media. Pada hakikatnya pers itu sudah netral dalam melakukan tugas peliputan sesuai kaidah jurnalistik yang berlaku,” timbalnya. **(dki1/bn)**